

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of Audit Findings, Audit Opinions, a Reexamination Resolution and Characteristics of Head Regional against Corruption Act Levels in Regional Governments for the Year 2015-2017. This research uses secondary data from the audit result of The Audit Board of The Republik Indonesia, the Corruption Eradication Commission Annual Report, Local Government financial reports and Ministry of Home Affairs data. This research uses purposive sampling method and linear regression analysis using the Eviews 9 application.

The results showed that the findings of non-compliance, Audit Opinion, a Reexamination Resolution and Characteristics of Head Regional did not have a significant effect on the level of corruption of local governments, while Internal Control System and the size of local governments had a significant effect on the level of corruption in Local Governments. Corruption Prevention in local governments can be done by implementing online-based governance (e-government) starting from the planning process, implementation to the budget accountability process.

Keywords: *Audit Findings, Audit Opinions, A Reexamination Resolution, Characteristics of Head Regional, Size of Local Government and Corruption Level of Local Government.*



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris besarnya Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, laporan Tahunan KPK, Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan data Kemendagri. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan analisis regresi linier dengan menggunakan bantuan program Eviews 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan Ketidapatuhan, Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Karakteristik Kepala Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, sedangkan SPI dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Daerah. Pencegahan Korupsi di Pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara menerapkan pemerintahan berbasis online (*e-government*) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban anggaran.

Kata Kunci : Temuan, Opini, TLHP, Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemda dan Tingkat Korupsi Pemda.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA